

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital merupakan evolusi mendasar yang terjadi dengan melibatkan sumber daya yang ada, termasuk memanfaatkan teknologi digital. Transformasi digital (DT) adalah fenomena yang tidak bisa dihindari ketika segala sesuatunya beralih ke fokus yang lebih besar pada penggunaan teknologi digital. Siap atau tidak, organisasi harus sepenuhnya merangkul transformasi digital agar dapat bertahan dan bersaing. Transformasi digital adalah sebuah proses yang memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan luaran dari organisasi guna memberikan pengalaman baru (Hadiono & Noor Santi, 2020).

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri meluncurkan sebuah aplikasi yang dinamakan “Identitas Kependudukan Digital” (IKD). Aplikasi IKD ini adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah dokumen kependudukan dalam bentuk aplikasi digital melalui *smartphone* yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Dasar hukum IKD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, pasal 13 ayat (1) disebutkan KTP-*el* berbentuk fisik dan/atau digital. Selanjutnya pada ayat (2), KTP-*el*

berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan. Jadi IKD memuat KTP-*el* yang berbentuk digital (Alah & Wi, n.d.).

Pada penerapan identitas digital mempunyai dasar hukum pada Pasal 1 Nomor 8 UU Nomor 24/2013 dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti nyata yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil, pada Pasal 5 b UU Nomor 24/2013 disebutkan bahwa pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional yaitu penetapan sistem, pedoman dan standar, dan untuk Pasal 87 a Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang SIAK menyatakan bahwa pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilakukan oleh Kementerian melalui Ditjen Dukcapil.

Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan target 25% dari 275.361.267 jiwa telah menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dituntut untuk mendorong masyarakat untuk bertransformasi ke KTP Digital. Pengembangan aplikasi kependudukan

digital sudah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Dengan digitalisasi ini diharapkan akses data kependudukan dapat terintegrasi dengan kepentingan berbagai bidang pendidikan, perawatan kesehatan, pariwisata, transportasi, dan logistik. Dengan diluncurkannya teknologi baru berupa aplikasi ini, karena adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti adanya lompatan-lompatan kinerja sehingga sistem kedukcapilan di Indonesia masih manual, terpecah-pecah, dan *segmented*. Sehingga setiap daerah memiliki sistem dan data tersendiri. Maka dari itu masyarakat harus datang dan bertemu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga tidak efektif dengan adanya layanan manual. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri RI meluncurkan teknologi berupa aplikasi yang disebut Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mempermudah masyarakat dalam layanan publik (Alah & Wi, n.d.).

Identitas Kependudukan Digital ini diharapkan dapat membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi semakin mudah, cepat, efektif dan efisien. Identitas Kependudukan Digital juga dapat menghemat anggaran pengadaan blangko KTP-*el*, *Ribbon*, film dan *cleaning kit*. Persyaratan pada pembuatan IKD ini yaitu pemohon harus mempunyai *smartphone* dan sudah mempunyai KTP-*el* atau pernah melakukan *biometric*. Selain itu Nomor *handphone* pemohon harus memiliki paket data internet atau bisa juga terhubung ke *WIFI* (Arison, 2023).

Di Kabupaten Sumedang Aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam

menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Nomor 470/17865/Dukcapil, tentang Penerapan IKD di Seluruh Indonesia. Penerapan aplikasi IKD di Kabupaten Sumedang ini telah dimulai sejak awal bulan November 2022. Hal ini sebagai salah satu implementasi dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan. Tujuannya untuk meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan di Indonesia.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang (H.Rusyana, S.Sos., M.A.P.) menginformasikan bahwa penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih terhitung sedikit yang menggunakannya karena aplikasi ini masih belum terbiasa dikalangan masyarakat jadi pasti akan susah untuk penerapannya (Gunawan, 2023).

Penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sumedang ini memiliki beberapa fenomena yaitu pertama masih kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Sumedang sehingga masyarakat masih minim mengetahui aplikasi tersebut, pada permasalahan kedua lembaga-lembaga pengguna seperti Perbankan masih belum bisa mengakses aplikasi Identitas Kependudukan Digital, ketiga masih banyak masyarakat di Kabupaten Sumedang yang belum mempunyai *smartphone android* versi 7.1 sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat, dan permasalahan keempat yaitu sarana dan prasarana serta SDM Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang masih terbatas.

Sehingga masyarakat menganggap tidak terlalu penting adanya aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan masyarakat juga masih belum merasakan manfaat dari aplikasi ini.

Tabel 1. 1 Pengguna Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Sumedang Sampai Dengan Bulan September 2023

No.	Uraian	Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang (Jiwa)	Pengguna IKD (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Identitas Kependudukan Digital	1.204.083	7,747	3,45%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Sumedang masih sangat jauh dari target. Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang 1.204.083 jiwa sebagai target pengguna aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Pengguna aplikasi Identitas Kependudukan Digital sampai dengan Bulan Oktober 2023 baru mencapai 7,747 jiwa atau 3,45% dari target keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Sumedang yaitu 1.204.083 jiwa. Sedangkan target untuk tahun 2023-2024 itu 30%. Sehingga diperlukan usaha yang lebih lagi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, lebih khususnya terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

Kabupaten Sumedang akan pentingnya penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Alfarizi (Millennial, 2023) yang mengkaji Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Millennial-Gen Z : Investasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia, menyatakan bahwa penelitian ini berfokus pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang diakses untuk generasi millennial Gen-Z dan untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual yang berkaitan dengan penerapan teknologi digital dalam administrasi kependudukan. Sedangkan pada penelitian ini diperuntukkan bagi seluruh penduduk Kabupaten Sumedang tanpa kecuali dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini sangat penting untuk masyarakat karena aplikasi IKD ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di zaman sekarang. Aplikasi IKD bisa membuat masyarakat lebih mudah lagi untuk mengurus dokumen-dokumen. Tidak perlu lagi memperbanyak seperti KK, KTP, AKTA, dan lain-lain, karena dengan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini hanya menunjukan *smartphone* kepada petugas di pusat pelayanan. Dan Ketika KK, KTP, dan AKTA hilang atau tertinggal itu tidak usah khawatir lagi karena sementara bisa menggunakan aplikasi IKD tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas Kabupaten Sumedang mengikuti program dari Kementerian Dalam Negeri

RI untuk menerapkan sebuah aplikasi yang bernama “Identitas Kependudukan Digital” (IKD). Aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mengurus dokumen-dokumen. Aplikasi ini merupakan sebuah transformasi digital untuk kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai aplikasi IKD, hal ini diperkuat dengan belum adanya penelitian sebelumnya yang meneliti terkait aplikasi IKD di Kabupaten Sumedang. Maka penelitian ini berjudul **“Transformasi Digital Sistem Kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (Studi pada Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat)”**. Dengan penelitian ini ditarik kesimpulan mengenai cara penerapan aplikasi IKD di Kabupaten Sumedang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi fokus atau permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian target pengguna aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sumedang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu: Mengkaji dan menganalisis kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian target pengguna aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sumedang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan yang baru dan menambah wawasan pada penulis serta dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumedang yang dijadikan sebagai sarana banding peneliti jika ingin melakukan penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tentang Transformasi Digital Sistem Kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (Studi pada Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa barat).

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 2 Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	(Et al., 2021)	<i>Cooperation and Interaction between Village and Sub-District Government in Administration Services Innovation: An Evidence in Lampung Province Indonesia</i>	Temuan ini juga mengungkapkan bahwa kegiatan penelitian dan kemitraan mengoptimalkan perbaikan dalam administrasi pelayanan sistem. Selain itu, para aktor juga berperan dalam mensosialisasikan implementasi program inovasi tersebut untuk mempercepat terwujudnya desa mandiri.
2.	(Suban & Reja, 2022)	<i>Developing Beru Subdistrict's Population Data Service Application Towards Paperless Office</i>	Banyak lembaga pemerintah dan swasta sudah mulai menggunakan informasi tersebut sistem untuk memproses data dan menghasilkan

		<i>And Good It Governance</i>	informasi yang berkualitas. Begitu pula dengan Beru Kantor Desa merupakan lembaga pemerintah yang membidangi kependudukan administrasi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Desa Beru saat ini menggunakan komputer sebagai alat administrasi yang berhubungan dengan pelayanan. Namun pembuatan sertifikat masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Word. Ini menyebabkan tidak efisiennya waktu yang dihabiskan dalam membuat email dan mencari data, dan Seringkali dokumen hilang dan rusak.
3.	(Nufus et al., 2022)	<i>Collaborative Governance on Registration and Publication of Population Administration in the Baduy Tribe, Kanekes Village</i>	Kegiatan administrasi kependudukan antara lain meliputi Dokumen yang dikeluarkan mempunyai peran dan manfaat yang besar bagi warga negara. Salah satu contoh dari permasalahan yang ditemukan di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Daerah tersebut dihuni oleh masyarakat adat Masyarakat Baduy, meskipun masyarakat Baduy Luar lebih terbuka, namun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mereka Administrasi kependudukan belum selesai.
4.	(Dailiati et al., 2018)	<i>Principles of Good Governance in the Department of Population and Civil Records Pekanbaru</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan penerapan prinsip good governance sudah baik, namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan ditingkatkan. Yakni kesetaraan dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Untuk itu perlu adanya perbaikan beberapa aspek.
5.	(Oktariyanda et al., 2021)	<i>Form of Public Service Innovation in toward Future of Government in</i>	Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Komponen Tata Kelola dan Inovasi, Sumber Ide Inovasi,

		<i>Surabaya City: Study of the "6 in 1" Population Administration Program</i>	Budaya Inovasi, Kemampuan dan Alat, Sasaran, Hasil, Pendorongan Hambatan, dan Pengumpulan Data Inovasi untuk Inovasi Tunggal telah berjalan cukup baik dan tidak ada kendala yang berarti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Inovasi program "6 in 1" memenuhi elemen fokus penelitian yang sesuai Bloch & Bugge walaupun masih belum sepenuhnya optimal.
6.	(Sofyani et al., 2020)	Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat budaya kepatuhan pada sektor TI berkaitan dengan kualitas layanan, akuntabilitas dan transparansi secara tidak langsung melalui ITG yang efektif. Hasilnya menunjukkan bahwa ITG yang efektif merupakan aspek krusial yang harus dipenuhi dianggap dapat mencapai keberhasilan pengembangan e-Government di wilayah Indonesia pemerintah.
7.	(Idrus & Zakiyah, 2022)	Electronic Information Based Citizen Population Management System Innovation in DKI Jakarta Population and Civil Registration Service Applications	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat budaya kepatuhan pada sektor TI berkaitan dengan kualitas layanan, akuntabilitas dan transparansi secara tidak langsung melalui ITG yang efektif. Hasilnya menunjukkan bahwa ITG yang efektif merupakan aspek krusial yang harus dipenuhi dianggap dapat mencapai keberhasilan pengembangan e-Government di wilayah Indonesia pemerintah.
8.	(Pusparini et al., 2023)	<i>Digitalization of Population Administration to Facilitate Public Services in the Era of Regional Autonomy</i>	Digitalisasi administrasi kependudukan merupakan integrasi kependudukan dan informasi kependudukan data ke dalam sistem digital berbasis internet dan program komputer. Di era teknologi ini, kebutuhan digitalisasi pelayanan publik khususnya di bidang administrasi kependudukan sangat penting dan harus dilakukan

			segera dilaksanakan. Namun kenyataannya, belum semua pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan hal tersebut upaya digitalisasi administrasi kependudukan.
9.	(Supriyanto et al., 2021)	<i>Administration Services Population Through Population Administration System Application Program (Study of Population Service Processes through the Population Administration System Application Program in Batu City of Indonesia</i>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan Sudah Siap di Kota Batu Program Aplikasi menyederhanakan segala proses administrasi yang sebelumnya terkesan berbelit-belit dan panjang.
10.		<i>Digital Governance Success Factors And Barriers To Success In Prague</i>	Artikel ini membahas faktorpenentu keberhasilan dan hambatan menuju kesuksesan implementasi inisiatif pemerintahan digital. Faktor dan hambatan keberhasilan yang penting dibahas pada tingkat individu, tingkat organisasi, danstrategis dan makalah ini diakhiri dengan menyoroti strategi yang dapat diambil manajer untuk meningkatkan kinerja e-Government. Dipertimbangkan bersama-sama, faktor penentu keberhasilan, hambatan implementasi, dan faktor-faktor utama yang diidentifikasi dalam studi kasus ini semakin menambah pertumbuhan tersebut literatur tata kelola digital dan manajemen kinerja.
11.	(Millenial, 2023)	Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Millenial-Gen Z : Investigasi Penerimaan Tranzsformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia	Pada hasil analisis diterimukan faktor kesadaran, pengaruh sosial, persepsi biaya untuk bertransformasi, dan kepercayaan yang dirasakan pada teknologi serta pemerintah sebagai penentu penting dari niat untuk menggunakan KTP Digital. Namun menariknya terdapat penolakan faktor risiko

			didalam penentu niat menggunakan KTP Digital yang ditelisik lebih lanjut dikarenakan beban tanggung jawab pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Sehingga studi ini menyimpulkan perlunya penguatan infrastruktur, jemput bola transformasi dan sosialisasi KTP Digital menjadi tiga solusi utama mendorong masyarakat yakin dan siap bertransformasi dengan KTP Digital.
12.	(Soedirman, 2023)	Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi	Hasil penelitian perlunya sosialisasi yang terus menerus tentang tata cara aktivasi dan manfaat aplikasi Identitas kependudukan Digital sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
13.	(Benshlomo, 2023)	Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya Jawa Timur	Artikel ini dianalisis karena adanya latar belakang pelayanan KTP Digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digencarkan oleh Disdukcapil Kota Surabaya. Pelaksanaan pelayanan KTP Digital dimulai pada bulan April tahun 2023 yang dapat dijangkau pada balai RW sekitar, pelayanan ini hanya ada pada beberapa kelurahan yang menjadi percontohan karena dilihat dari tingginya minat masyarakat untuk mengaktifkan KTP Digital. bertujuan untuk meningkatkan pelayanan adminduk dikatakan cukup, dari segi petugas yang memberikan pelayanan mampu memberi informasi dan arahan secara jelas dan baik.
14.	(Wicaksana & Rachman, 2018)	Penerapan Inovasi <i>Digital Id</i> Bagi Asn Pemerintah Kota Tegal Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tegal	Karena data yang terintegrasi dalam sistem dapat diproses dengan mudah dan akurat, inovasi digital identitas menjadi lebih cepat dan efisien. Ada beberapa hal hambatan pada program peningkatan produktivitas, termasuk perangkat teknologi yang sering mengalami gangguan, data penduduk yang tidak valid,

			dan kondisi sosial budaya yang kurang aktif. Pada hasil analisis penelitian, Disdukcapil Kota Tegal harus melakukan perbaikan jaringan, menerapkan metode jemput bola kepada masyarakat, dan melakukan pendataan ulang.
15.	(Risma, 2022)	Penerapan Ict (Information Communication Technology) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Aceh Barat Daya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penerapan pelayanan KTP-el menggunakan sistem input, proses, dan output data pemohon yang harus memiliki KTP-el dan telah terdaftar di database kependudukan nasional secara online. Bentuk penerapan pelayanan KTP-el ditunjukkan oleh pegawai dalam melayani pemohon dengan komunikasi dan struktur birokrasi untuk menjamin bahwa pelayanan penerbitan KTP-el akan lebih baik.
16.	(Kencono, Dewi Sekar, Winarsih, 2022)	Penerapan Jogja Smart Service dalam Pengamplikasian Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Kota Yogyakarta	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan bentuk sosialisasi atau penyuluhan terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan pendampingan yang diarahkan dalam bentuk praktik. Luaran serta manfaat yang akan didapatkan dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini antara lain dapat mengedukasi penggunaan JSS dalam bentuk pelayanan terbarukan satu pintu di mana akan banyak akses penting untuk seluruh masyarakat, serta dapat membantu masyarakat untuk berpikir kreatif dan inovatif serta solutif
17.	(Putri & Mutiarin, 2018)	Efektifitas Inovasi Kebijakan Publik; Pengaruhnya pada Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia	Inovasi kebijakan publik diadopsi tidak hanya sebagai langkah untuk menghadapi perubahan lingkungan organisasi, melainkan juga untuk mereduksi label “negatif” yang disematkan kepada birokrasi. Salah satu tujuan dari inovasi kebijakan publik adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui

			bagaimana efektifitas inovasi pelayanan publik terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia.
--	--	--	---

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, beberapa peneliti terdahulu menganalisis Teknologi digital, aplikasi IKD, serta penerapan ICT. Dalam penelitian tersebut kebijakan *e-government* yakni transformasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik menjadi KTP Digital yang akan dilaksanakan bertahap dalam rangka transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu merupakan penyelesaian final asimetris dari problem pencetakan KTP Elektronik yang selama ini menjadi keluhan menahun di tengah masyarakat. Beberapa peneliti juga menyimpulkan bahwa adanya faktor penghambat pada keamanan perangkat teknologi yang masih sering mengalami gangguan, adanya data penduduk yang tidakvalid, dan keadaan sosial budaya kurang aktif. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu dengan cara pendataan ulang pada saat jemput bola kepadamasyarakat untuk bisa mengoptimisasikan adanya aplikasi ini.

- a. Menurut (Millenial, 2023) dalam judul “Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Millenial-Gen Z : Investigasi Penerimaan Transformasi Digital Kebijakan

Kependudukan Indonesia” Pada hasil analisis ditemukan faktor kesadaran, pengaruh sosial, persepsi biaya untuk bertransformasi, dan kepercayaan yang dirasakan pada teknologi serta pemerintah sebagai penentu penting dari niat untuk menggunakan KTP Digital. Namun menariknya terdapat penolakan faktor resiko didalam penentu niat menggunakan KTP Digital yang diteliti lebih lanjut dikarenakan beban tanggung jawab pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

1. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan mendorong masyarakat agar siap bertransformasi dengan KTP digital.
2. Perbedaan pada penelitian terdahulu lebih berfokus kepada mendorong Millennial-Gen Z untuk menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan menggunakan metode kuantitatif sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk

masyarakat kabupaten Sumedang dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Transformasi Digital

Perkembangan internet pada saat ini sudah sedemikian pesat. Pada perkembangan informasi dan jaringan sosial tersebut telah mengumpulkan banyak data pada jaringan internet. Keberadaan internet memudahkan masyarakat dalam transaksi elektronik yang bisa diakses melalui komputer maupun *smartphone*. Perangkat seluler *smartphone* dan aplikasi yang ada didalamnya telah diluncurkan dengan kecepatan tinggi, mengubah perangkat ini menjadi *platform* komputasi yang nyaman dan serba guna (Zazin & Zaim, 2020).

Menurut (Deloitte, 2019), transformasi digital adalah penggunaan teknologi untuk secara radikal meningkatkan kinerja atau jangkauan organisasi. Dalam bisnis yang ditransformasikan secara digital, teknologi digital memungkinkan proses yang lebih baik, melibatkan talenta, dan model bisnis baru. Pelaksanaan transformasi digital tidak hanya sekedar mengubah cara mengeksekusi sesuatu yang awalnya manual berubah menjadi digital, namun juga pentingnya menciptakan model bisnis yang baru disinilah layanan yang lebih mudah diakses, efektif, efisien, dan inklusif diramu serta keterlibatan sumber daya manusia (SDM) sebagai *driver* harus memiliki kemampuan dan

keterampilan untuk mengoperasikan, mengelola, maupun berinovasi dengan teknologi digital.

Transformasi digital secara umum dianggap sebagai pendorong perubahan dalam semua konteks dan mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia berdasarkan penggunaan teknologi dan digitalisasi. Transformasi digital juga dapat didefinisikan sebagai modifikasi yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi dan inovasi yang memicu perubahan (Maduwinarti & Taali, 2023).

Transformasi digital biasanya menjadi kata kunci yang merujuk pada perubahan dunia ruang lingkup dan arah tata kelola digital: seperti yang dicoba oleh para praktisi menerapkan pendekatan komprehensif terhadap pemerintahan digital para peneliti hanya bertujuan untuk digitalisasi proses offline yang ada memahami bagaimana dan mengapa inisiatif ini berhasil atau gagal. Digitalisasi Upaya ini merupakan perbaikan penting bagi sektor pemerintahan agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam prosesnya, namun hal ini semakin sering terjadi. Penting untuk tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi yang tersedia (Mergel et al., 2019).

Menurut (Tulungen et al., 2022) Transformasi Digital penting untuk sektor pemerintahan yang sangat bergantung pada sistem, TI, strategi, dan sumber daya manusia. Pemerintah saat ini harus cepat dipaksa menuju masa depan digital dan memanfaatkan peluang signifikan untuk memajukan ekosistem pengetahuan dan inovasi

dengan teknologi, kolaborasi dan ko-kreasi. Tentu saat pandemi berakhir, pemerintah perlu menghindari kembali ke tata kelola, proses, dan keadaan yang lama. Dengan memanfaatkan teknologi informasi proses kerja dalam sektor pemerintahan akan semakin terbantu. Selain itu dengan adanya penggunaan data besar proses pengambilan keputusan oleh pimpinan akan lebih dipermudah.

Pada penelitian ini menggunakan teori transformasi digital menurut (Westerman et al., 2014) Transformasi Digital terdiri dari efek gabungan dari beberapa inovasi dan teknologi digital yang menciptakan struktur, praktik, nilai, pengaturan, dan keyakinan baru yang mengubah, menggantikan, atau melengkapi aturan dalam organisasi, ekosistem, dan industri. Transformasi digital penting bagi semua sektor pemerintah yang sangat bergantung pada sistem, teknologi informasi, strategi, dan sumber daya manusia. Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan teori Transformasi digital karena dapat memudahkan pemerintah maupun masyarakat dalam menjalankan proses pelayanan umum dan sebagai upaya peningkatan kinerja kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan variabel pengaruh sosial, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi pemanfaatan. Dengan adanya variabel mewujudkan indikator dan parameter penelitian yang terdiri dari:

1. Terdapat variabel pengelolaan, indikator pengelolaan aplikasi dengan parameter perencanaan dan implementasi

2. Variabel kualitas program, indikator pengaruh sosial dengan parameter kualitas SDM, faktor pendukung, dan faktor penghambat.
3. Variabel penggunaan aplikasi, indikator keamanan aplikasi dengan parameter privasi data, dampak, efektivitas.

1.6.2 Digital Governance

Menuurt (Setyawati & Fitriati, 2023) Tata Kelola digital atau yang sering disebut sebagai *Digital Governance* tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan saat ini. *Digital Governance* pertama muncul dari perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup tata kelola negara. Adapun manfaat yang didapatkan pada penerapan *Digital Governnace* yaitu tersedia kases bagi publik untuk mendapatkan suatu informasi. Pada *Digital Governance* juga sama dengan konsep pada *Smart City* menjadikan pemerintahan yang lebih terbuka, transformatif, kolaboratif dan memaksimalkan pada pengguna teknologi.

Digital Governance menjadikan sistem yang diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik. Pada sistem pemerintahan berbasis digital akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan suatu pelayanan. Begitu pada penerapan *Digital Governance* sebagai penyederhanaan sistem dalam kerja birokrasi untuk menjadi lebih akurat, responsif, dan transpoaran dalam pelaksanaan. Hal ini sama dengan salah satu kriteria *Good Governance*, yaitu Transparansi.

Pelayanan informasi digital merupakan salah satu output dari *digital governance*. Keterbukaan informasi diatur dalam peraturan tentang keterbukaan Informasi Publik.

1.6.3 Sistem Kependudukan

Menurut (Ripa'i, 2018) Sistem Kependudukan merupakan sistem yang mempunyai peran sangat penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan data kependudukan yang diarahkan pada pemenuhan hak dari setiap warga negara. Sejalan dengan arah penyelenggaraan pendataan kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub pilar kependudukan yang perlu ditata dengan sebaik-baiknya, agar dapat memberikan Manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan, dimana pengelolaan data penduduk merupakan tanggung jawab pemerintahan Kabupaten/kota, dalam pelaksanaanya diawali Rt/Rw/Desa dan Kecamatan selaku ujung tombak pendataan penduduk.

Menurut (Itats, 2013) Sistem Kependudukan merupakan bagian dari Sistem Administrasi Negara yang mempunyai peranan sentral dalam pemerintahan untuk mengelola data kependudukan. Sistem kependudukan juga bagian dari program tertib data kependudukan yang dicanangkan pemerintah. Untuk itu setiap instansi harus memiliki data-data kependudukan yang bersifat elektronik. Setiap orang berhak mendapat pelayanan Administrasi Kependudukan dengan baik dan mudah. Kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan

pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan.

1.7 Definisi Konseptual

Teori Transformasi digital secara umum dianggap sebagai pendorong perubahan dalam semua konteks dan mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia berdasarkan penggunaan teknologi dan digitalisasi. Transformasi digital juga dapat didefinisikan sebagai modifikasi yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi dan inovasi yang memicu perubahan. Salah satu contohnya adalah pada penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk transaksi pelayanan.

1.8 Defisini Operasional

Tabel 1. 3 Definisi Operasional

NO	Landasan Teori	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Transformasi Digital	1. Pengelolaan	Pengelolaan Aplikasi	a. Perencanaan b. Implementasi
		2. Kualitas Program	Pengaruh Sosial	c. Kualitas SDM d. Faktor pendukung e. Faktor penghambat
		3. Penggunaan Aplikasi	Keamanan Aplikasi	f. Privasi data g. Efektivitas h. Dampak

1.9 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2016).

1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan asumsi permasalahan bersifat kompleks, dinamis dan bermakna, sehingga data yang dihasilkan tidak jelas dan tidak mungkin diselesaikan dengan penelitian kuantitatif seperti kuesioner.

Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami situasi sosial secara mendalam dengan mencari teori melalui studi literatur, wawancara, observasi dan dokumentasi langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian ini lokasi peneliti berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Masih Kurangnya sosialisasi dari Disdukcapil Kabupaten Sumedang, terkait dengan aplikasi IKD maka masyarakat tidak mengetahui adanya aplikasi ini dan Disdukcapil Kabupaten Sumedang harus terus-menerus membuat sosialisasi kepada masyarakat, karna jika tidak disosialisasikan lebih maka masyarakat tidak akan terbiasa dengan adanya aplikasi IKD ini serta presentase yang mengakses aplikasi IKD masih rendah, dan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki smartphone serta kurangnya pengetahuan tentang teknologi yang menyebabkan aplikasi IKD ini belum terbiasa digunakan.

1.9.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan berbentuk kata maupun informasi dan tidak disertai dengan angka maupun penjumlahan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1.9.3.1 Data Primer

Data primer adalah salah satu sumber data yang secara langsung didapatkan oleh peneliti. Sumber dari data tersebut dengan teknik

wawancara dengan subjek penelitian secara bertatap muka. Dalam penelitian ini, hasil data akan dikumpulkan dengan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yaitu Drs. H. Bangbang Kustiantoro, M.Si sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ferry Fardians, S.STP, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rusyana, S.Sos, MAP sebagai Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, dan masyarakat sebagai pengguna aplikasi IKD. Setelah mendapatkan data dari responden, peneliti akan menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data tersebut.

1.9.3.2 Data Sekunder

Adapun data sekunder yang menjadi data pendukung yang digunakan oleh peneliti untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Dan dapat menemukan informasi ini dengan cepat. Dalam penelitian ini, sumber informasi sekunder yang akan diambil adalah artikel, website, jurnal, literatur, makalah, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah.

1.9.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan. Menurut Moleong (2012:132), informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian. Informan penelitian ini yaitu:

4. Informan Kunci (*Key Informan*) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
5. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Pemilihan informan dilakukan dengan metode *intensity sampling*. dengan menggunakan teknik sampling ini seorang peneliti bisa memilih partisipan yang sudah akrab dan berpengalaman dengan kejadian dan peristiwa itu. Dalam hal ini target pada penelitian ini yaitu pengguna aplikasi Identitas Kependudukan Digital, untuk mencapai target harus ada kesiapan dari perangkat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut Morse, 1986 Informan yang baik yaitu seseorang yang mampumenangkap, memahami dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara, serta semangat untuk berperan serta dalam penelitian (Denzin & Lincoln, 2009). Berdasarkan metode yang sudah dipilih, kita dapat melihat perlunya mengidentifikasi informan agar mendapatkan informan yang benar dalam sebuah penelitian, sehingga penelitian ini mejadi

meyakinkan kerana informan yang benar. Pemilihan narasumber atau informan yang dipilih sebagai sumber informasi penelitian ini adalah:

1. Informan Kunci (*Key Informan*) pada penelitian ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebagai pihak yang mengetahui secara konseptual dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital, sedangkan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjelaskan bisa menjelaskan pelaksanaan program serta memberikan pembinaan, dan Kepala Bidang PIAK bisa menjelaskan lebih detail terkait rencana pada penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan.
2. Informan tambahan pada penelitian ini yaitu masyarakat Kabupaten Sumedang yang sudah menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan 2 macam metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1.9.5.1 Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan yang dilakukan pada saat konteks yang dianggap tepat guna dalam mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berkali-kali secara frekuentatif sesuai dengan keperluan peneliti tentang kejelasan masalah penelitian yang difokuskannya. Peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan- keterangan

yang berkaitan dengan penerapan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut daftar responden yang akan di wawancarai pada penelitian ini.

Tabel 1. 4 Daftar Responden Wawancara

No.	Nama	Pekerjaan	Data Yang Digunakan
1.	Drs. H. Bangbang Kustiantoro, M.Si.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang	Untuk mengetahui mengenai kesiapan dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital
2.	Ferry Fardians, S.STP, M.Si.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Untuk mengetahui kesiapan dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital
3.	Rusyana, S.Sos., MAP	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Untuk mengetahui target pengguna aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4.	Masyarakat	Pengguna Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan belum menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital	Untuk mengetahui perkembangan dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Pada tabel 1.4 daftar responden wawancara, peneliti akan melakukan wawancara dengan Drs. H. Bangbang Kustiantoro, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang akan memberikan data kepada peneliti tentang kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital, selanjutnya sebagai responden kedua

Ferry Fardians, S.STP, M.Si selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang akan memberikan data kepada peneliti tentang kesiapan dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital, responden ketiga dengan Rusyana, S.Sos., MAP. selaku Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang akan memberika data kepada peneliti tentang target pengguna aplikasi Identitas Kependudukan Digital, dan peneliti juga melakukan wawancara dengan keterwakilan sebanyak 4 orang masyarakat baik itu yang sudah menggunakan maupun yang belum menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

1.9.5.2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, foto, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Metode Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini dilakukan pada saat turun lapangan, peneliti akan mencari dokumentasi yang terkait dengan penelitian, maka dari itu penelitian ini mengambil dokumentasi berupa foto, dokumen, dan grafik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data juga dapat di artikan sebagai proses pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, dimana peneliti menghimpun setiap data- data yang dijelaskan masing-masing presepsi yang sesuai dengan judul penelitian tersebut. Jadi analisis data adalah suatu cara untuk mengelola data setelah diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan data yang faktual.

1.9.6.1 Reduksi Data

Dalam penelitian ini menggunakan reduksi data untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Maka data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, dan masyarakat dapat dikumpulkan dan di pilah secara selektif untuk menentukan data yang tepat digunakan sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian

1.9.6.2 Penyajian Data

Setelah mereduksi data, peneliti menggunakan Penyajian data untuk proses data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian yang sesuai dengan rumusan permasalahan. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk penyajian data kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*.

1.9.6.3 Penarikan kesimpulan

Pada tahap terakhir peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi apabila kesimpulan awal masih menjadi kesimpulan sementara dan masih akan berubah apabila tidak lagi ditemukan bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kemudian kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan dapat diverifikasi selama penelitian langsung dengan cara meninjau ulang catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan yang dikonfirmasi ke informan. Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.